



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANANm TANGKAP
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN**

**RUMUSAN
PERTEMUAN KOORDINASI
PROGRAM PERBAIKAN PERIKANAN NASIONAL TAHUN 2024**

Jakarta, 25 November 2024

Pertemuan Koordinasi Program Perbaikan Perikanan/*Fisheries Improvement Program* (FIP) Nasional dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 25 November 2024. Pertemuan dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi perkembangan, tantangan, dan rencana tindak lanjut dari FIP yang ada di Indonesia.

Pertemuan dibuka oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan dihadiri oleh berbagai pihak, yaitu perwakilan dari:

1. Direktur Regional Asia Pasifik MSC
2. Direktur Program MSC Indonesia
3. Biro Perencanaan, Setjen
4. Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDI LPTK
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
6. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku
7. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
8. FPIK IPB University
9. FPIK Universitas Brawijaya
10. FPIK Universitas Pattimura
11. FPIK Universitas Diponegoro
12. Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (FIP2B) Provinsi NTB,
13. Asosiasi Purse Seine Indonesia (APSI)
14. Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI)
15. Asosiasi Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI)
16. Asosiasi Pengelola Rajungan Indonesia,
17. Asosiasi Demersal Indonesia,
18. Himpunan Pengusaha Penangkapan Udang (HPPI)
19. Sustainable Fisheries Partnership,
20. Marine Stewardship Council Indonesia,
21. Yayasan WWF Indonesia,
22. Yayasan Pesisir Lestari,
23. Yayasan JARI,
24. Yayasan IPNLF Indonesia,
25. Yayasan MDPI,
26. Yayasan LINI,
27. Yayasan Konservasi Alam Nusantara,

28. Yayasan Rekam Nusantara,
29. PT Aneka Tuna Indonesia
30. PT Pahala Bahari Nusantara,
31. PT Sekar Laut,
32. PT Cassanatama Naturindo,
33. PT Karya Kencana Sumber Sari,
34. PT Agrita Seafood,
35. PT Aruna Indonesia,
36. PT Sahabat Laut Lestari,
37. PT Sumber Yala Samudera.
38. Fish for Good Squid FIP Team

Pertemuan ini menghasilkan rumusan sebagai berikut:

1. Pertemuan Koordinasi Program Perbaikan Perikanan Nasional menghasilkan komitmen untuk memperkuat kolaborasi antara semua pemangku kepentingan dalam sektor perikanan, dengan fokus pada implementasi Program Perbaikan Perikanan/*Fisheries Improvement Program* (FIP) dan pengembangan *ecolabel* perikanan, guna memastikan keberlanjutan sumber daya ikan dan mendukung ketahanan pangan nasional.
2. Salah satu bentuk dukungan Pemerintah yaitu penyusunan dan implementasi Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) berbasis WPPNRI dan jenis ikan. Dokumen berfungsi sebagai kerangka kerja strategis yang menetapkan tujuan dan langkah-langkah pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan FIP. Selain itu Penyusunan dan Implementasi Strategi Tangkap/*Harvest Strategy* (HS) dan Aturan Kendali Tangkap/*Harvest Control Rule* (HCR) yang memberikan panduan operasional untuk pengelolaan stok ikan. HS menetapkan strategi yang jelas untuk penangkapan ikan yang berkelanjutan.
3. Standar perikanan MSC telah diubah dari MSC Versi 2.0 menjadi MSC versi 3.1 dan diterapkan sejak 1 Mei 2023. Perikanan yang akan masuk pada proses Penilaian Penuh untuk sertifikasi perikanan MSC wajib menggunakan versi 3.1 jika masuk setelah Juli 2026. Sedangkan perikanan dalam program *In-Transition to MSC/Improvement Program* memiliki waktu sampai dengan November 2030.
4. Perlu menjadi perhatian khusus bahwa MSC Fisheries Standard V.3.1 mewajibkan adanya *independent observation* dan *verification* yang diterapkan pada operasional pengumpulan data dan informasi perikanan.
5. Perkembangan pengelolaan perikanan udang di Kalimantan Selatan dengan Lembaga pelaksana PT. Sekar Laut adalah sebagai berikut:
 - a. Rencana aksi untuk perikanan udang di Kalimantan Selatan masih berstatus *on track* mencakup pengumpulan dan pemantauan data (Aksi 1), penilaian stok untuk Udang Putih dan Udang Bintik (Aksi 2), pengembangan strategi penangkapan (Aksi 3), pemantauan bycatch dan status ekosistem (Aksi 4), perlindungan habitat-ekosistem (Aksi 5), penegakan hukum (Aksi 6), serta pengembangan dan finalisasi Rencana Manajemen Perikanan FMA 713 untuk perikanan udang (Aksi 7), dengan tujuan mencapai pengelolaan yang berkelanjutan dan efektif.
 - b. Rencana aksi lain yang telah dilakukan melakukan pertemuan pemangku kepentingan untuk membahas isu status stok dan *e-logbook*, memasang alat seperti kamera dan GPS di kapal nelayan, sosialisasi kepada nelayan

- mengenai spesies yang terancam punah dan dilindungi/*Endangered Threatened and Protected* (ETP), serta membentuk konsorsium tiga perusahaan untuk implementasi FIP yaitu PT. Sekar Laut, PT. Cassanatama Naturindo, dan PT. Karya Kencana Sumber Sari
- c. Tantangan pada perikanan udang adalah Proses pendaftaran TDKP kapal yang membutuhkan waktu lama namun memiliki jangka waktu yang singkat;
 - d. Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah peningkatan penggunaan *logbook* yang disederhanakan menjadi *e-logbook* melalui koordinasi bersama lembaga terkait untuk kelengkapan berkas; dan mendorong penyusunan RPP, *harvest strategy*, dan *harvest control rule* udang.
6. Perkembangan pengelolaan perikanan tuna dengan lembaga pelaksana ATLI adalah sebagai berikut:
- a. Komponen yang masih dalam status merah yaitu Pembangunan kembali stok (1.1.2) Keluaran spesies primer (2.1.1)
 - b. Rencana aksi mencakup pengembangan Rencana Manajemen Tuna Nasional (2020-2024) yang telah selesai, dengan tujuan spesifik untuk setiap metode penangkapan, serta peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum melalui pelatihan dan evaluasi kinerja industri perikanan, yang juga telah diselesaikan.
 - c. Selain itu, rencana ini melibatkan pengumpulan data untuk mendukung strategi manajemen spesies utama dan sekunder, partisipasi aktif dalam pengembangan strategi penangkapan dan aturan pengendalian, serta penguatan mitigasi penangkapan sirip hiu, dengan beberapa tindakan masih dalam proses dan dijadwalkan untuk diselesaikan pada tahun 2024 hingga 2027.
 - d. Tantangan yang dihadapi yaitu sebanyak 30% ETP dibuang dan berdasarkan hasil riset di laut pasifik dan saat ini sedang melakukan pelatihan observer untuk mencatat ETP yang ditangkap dan sudah mulai berjalan.
 - e. Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah peningkatan jumlah observer on board untuk memantau kegiatan yang berlangsung di atas kapal.
7. Perkembangan pengelolaan perikanan udang di Demak dengan lembaga pelaksana PT Cassanatama Naturindo adalah sebagai berikut:
- a. Saat ini masih dilakukan koordinasi dan peninjauan kerjasama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam proses perbaikan pengelolaan udang di Jawa Tengah,
 - b. Tantangan yang dihadapi adalah belum adanya metode yang disepakati dalam pendugaan stok udang putih di Jawa Tengah,
 - c. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah pembentukan pokja perikanan udang di Jawa Tengah; mendorong penyusunan RPP, *harvest strategy*, dan *harvest control rule* udang di Jawa Tengah; dan mendorong udang menjadi perikanan prioritas di WPPNRI 712.
8. Perkembangan pengelolaan perikanan TCT di Samudera Hindia dengan lembaga pelaksana PT Aneka Tuna Indonesia adalah sebagai berikut:
- a. Progress saat ini antara lain membuat MoU antara stakeholders, menjadi inisiator FIP Purse Seine di Indian Ocean, melibatkan 120 kapal penangkapan ikan dengan total pendaratan 150.000 ton per tahun

- b. Tantangan yang dihadapi adalah Indonesia belum melaksanakan pelaksanaan pemulihan stok di IOTC, pendataan ETP yang masih kurang, Kurangnya jumlah observer (kebanyakan observer untuk kapal longline).
 - c. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah Mengumpulkan data dan informasi terkait perikanan purse seine dan berkoordinasi dengan DJPT untuk pengadaan observer.
9. Perkembangan pengelolaan perikanan TCT di Sulawesi Utara dengan lembaga pelaksana APSI disampaikan bahwa tantangan utama adalah observer perikanan yang masih kurang. Observer menjadi penting karena akan berperan dalam proses pengumpulan data/informasi serta kepatuhan di RFMO. Harapannya bisa ada rencana pasti dalam pengembangan program observer di Indonesia.
10. Perkembangan pengelolaan perikanan TCT di Sulawesi Tenggara dengan lembaga pelaksana PT Pahala Bahari Nusantara adalah sebagai berikut:
- a. Perkembangan saat ini antara lain penempatan observer on board dan analisis data observer, inisiasi pelatihan observer di Semarang dan sudah ada 19 observer baru yang bergabung, sudah ada 26 observer di Kendari yang akan dikerjasamakan dengan SDI untuk ditempatkan di kapal rantai pasokan (lebih dari 4.500 hari layar),
 - b. Tantangan utama terkait pengamat adalah menentukan dan menerapkan tingkat cakupan pengamat yang memadai serta sistem pemulihan biaya yang adil, sambil memastikan konsistensi dan efektivitas di seluruh kelompok jaring pukat.
 - c. Tindak lanjut peningkatan kebutuhan observer untuk kepatuhan nelayan dan peningkatan data (produksi dan ETP), Kerjasama dengan SDI dalam validasi dan analisis data.
11. Perkembangan pengelolaan perikanan TCT di Samudera Hindia dan Pasifik untuk Pole and line dan Handline dengan lembaga pelaksana AP2HI adalah sebagai berikut:
- a. Perkembangan saat ini antara lain perikanan tuna WCPFC YFT HL: semua Prinsip sudah hijau terkecuali strategi tangkap, adanya perbaikan signifikan terkait dengan pendataan, rutin melakukan pelatihan kepada nelayan untuk memahami penanganan ETP, Perikanan tuna WCPFC SKJ dan YFT – PL: semua Prinsip sudah hijau,
 - b. memastikan implementasi strategi tangkap yang efektif untuk perikanan tuna WCPFC YFT HL, sambil meningkatkan pendataan ETP dan melakukan kolaborasi yang produktif dengan penggiat FIP Tuna di Samudera Hindia.
 - c. Tindak lanjut Melakukan pendataan dan memasang alat pengawasan untuk peningkatan pendataan ETP, semua FIP WCPFC HL PL akan di close, MSC SKJ HL dan ALJB. Tindak Lanjut lainnya adalah akan dilakukan diskusi terkait pra penilaian atau kolaborasi dengan penggiat FIP Tuna diperairan Samudera Hindia.
12. Perkembangan pengelolaan perikanan gurita di Selat Alas NTB, dengan lembaga pelaksana Yayasan JARI adalah Tata Kelola partisipasif yang berkoordinasi melalui Pemerintah Desa dan belum masuk ke *fisheryprogress*.

13. Perkembangan pengelolaan perikanan gurita di Sulawesi dengan lembaga pelaksana Yayasan Pesisir Lestari adalah sebagai berikut:
 - a. Status yang masih merah yaitu di indikator 1.2.1 Strategi Tangkap dan 1.2.2. Aturan Kendali Tangkap dengan dengan HS mencakup HCR menjadi fokus perbaikan.
 - b. Penyusunan HS dan HCR menunggu penyelesaian dan Penyusunan RPP Gurita yang saat ini sudah melalui proses stakeholder meeting menuju tahapan finalisasi dokumen.
 - c. Proses penelitian stok target khususnya sedang indikator stok yang digunakan.
 - d. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan perikanan gurita adalah kurangnya data spesifik mengenai siklus hidup gurita, yang diperlukan untuk penerapan model pengelolaan yang efektif, serta tantangan terkait kapasitas SDM yang bervariasi dan dukungan finansial yang terbatas, sementara fokus pada strategi pengelolaan dan pemulihan stok (HS & HCR) masih rendah dalam FIP saat ini.
 - e. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), *harvest strategy*, dan *harvest control rule* terkait cumi-cumi.

14. Perkembangan pengelolaan perikanan gurita (*Octopus cyanea*) di Nusa Tenggara Timur, Indonesia, sedang menjalani proses FIP dengan Status masih C. FIP ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan perikanan melalui pengumpulan data dan pembentukan struktur manajemen yang sesuai dengan Prinsip 2 dan 3 dari Standar MSC, serta memberikan informasi penting terkait spesies target untuk Prinsip 1. FIP ini berfokus pada kemajuan dalam pengumpulan data dan pengembangan manajemen spesifik perikanan, dengan harapan dapat berkolaborasi dengan FIP regional lainnya untuk mendukung proses FIP nasional di masa depan.

15. Perkembangan pengelolaan perikanan cumi-cumi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:
 - a. Status yang masih merah yaitu: (1.2.1) HS, (1.2.2) HCR, *Fishery-specific objectives* (3.2.1) *Compliance & enforcement* (3.2.3). Beberapa menunjukkan perbaikan khususnya di *Harvest strategy information & monitoring* (1.2.3) *ETP species outcome* (2.3.1) *Ecosystem information* (2.5.3), *Decision-making processes* (3.2.2), *Monitoring & management performance evaluation* (3.2.4)
 - b. Tantangan yang dihadapi adalah data dan informasi secara umum terkait cumi-cumi di Indonesia masih terbatas khususnya data dan informasi dalam penyusunan RPP, HS dan HCR perikanan cumi-cumi.
 - c. Tindak lanjut yang dilakukan antara lain membuat pranaskah review RPP WPPNRI 571 dengan tambahan data dan informasi cumi-cumi dan mengamankan penyusunan HS dan HCR cumi-cumi di WPPNRI 571 dalam rencana aksi RPP WPPNRI 571.

16. Perkembangan pengelolaan perikanan rajungan dengan lembaga pelaksana APRI adalah sebagai berikut:
 - a. FIP Rajungan sudah memasuki tahap ITM
 - b. Tidak ada status indikator yang merah. Indikator yang masih kuning yaitu *Stock status outcome* (1.1.1), *Harvest strategy* (1.2.1), *Harvest control rules*

& tools (1.2.2), Harvest strategy information & monitoring (1.2.3), Habitat outcome (2.4.1), Ecosystem outcome (2.5.1).

- c. Beberapa Prgress pelaksanaan yang dilakukan antara lain:
1. Penilaian Stok *Portunus pelagicus*: Perekrutan enumerator, pengumpulan data, dan publikasi hasil.
 2. Dokumen Kontrol: Implementasi dokumen kontrol untuk kepatuhan,
 3. Kepatuhan dan Penegakan Hukum: Sosialisasi pedoman praktik perikanan.
 4. Studi Upaya Penangkapan: Pengumpulan dan analisis data upaya penangkapan.
 5. *Restocking* rajungan: Kerja sama untuk *restocking* dan pemantauan.
 6. Strategi Penangkapan rajungan: Lokakarya dan pengujian strategi penangkapan.
 7. Penilaian Spesies Non-Target: Pengumpulan dan analisis data.
 8. Selektivitas Alat Tangkap: Pengembangan alat tangkap untuk mengurangi tangkapan sampingan.
 9. Pengelolaan Pasca-Tangkap ETP: Pelatihan untuk nelayan.
 10. Studi Dampak Habitat dan Ekosistem: Pengumpulan dan analisis sampel (informasi tidak lengkap).
- d. Tantangan utama dalam proses pengembangan pengelolaan perikanan adalah memastikan pelatihan yang efektif bagi enumerator, pengumpulan dan analisis data yang akurat, serta penerapan dan sosialisasi pedoman praktik perikanan yang bertanggung jawab di kalangan nelayan untuk meningkatkan keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya laut.
- e. Tindak lanjutnya meliputi peningkatan pelatihan enumerator, pengembangan sistem database, sosialisasi pedoman praktik perikanan yang bertanggung jawab, monitoring dan evaluasi berkala, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta penyusunan rencana aksi yang jelas untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan perikanan.

17. Perkembangan pengelolaan perikanan rajungan di Kalimantan Timur dengan lembaga pelaksana PT Aruna adalah sebagai berikut:

- a. Progress Rating D,
- b. Progres tindakan untuk pengelolaan rajungan (BSC) di FMA 713:
 1. Penilaian Stok rajungan: Pengumpulan data dan publikasi ilmiah.
 2. Strategi Penangkapan rajungan: Pengembangan dan sosialisasi strategi penangkapan.
 3. Penilaian tangkapan sampingan: Pengumpulan dan analisis data tangkapan.
 4. Manajemen Pasca-Tangkap: Persiapan dan sosialisasi manajemen pasca-tangkap.
 5. Dampak Perikanan pada Ekosistem: Pengumpulan data habitat dan pemantauan ekosistem.
 6. Dewan Pengelolaan Rajungan: Pembentukan kelompok pengelolaan di Balikpapan.
 7. Sistem Pemantauan: Pembentukan kelompok pemantauan dan pelatihan.

18. Perkembangan pengelolaan perikanan kepiting bakau di Provinsi Maluku dengan lembaga pelaksana Yayasan WWF Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pendugaan status stok sudah dilakukan untuk spesies *Scylla serrata* dan *S. olivacea* dengan indikator LPSR dan CPUE dan telah disusun HS dan HCR di Tingkat lokal
 - b. Pengumpulan Data: Data kuantitatif tentang lokasi penangkapan dan habitat telah dikumpulkan melalui proyek dispersal larva, logbook, dan laporan EAFM.
 - c. Monitoring Ekosistem: Monitoring yang lebih baik terhadap indikator kinerja, seperti bycatch dan area penangkapan, telah meningkatkan pemahaman tentang dampak ekosistem dan perikanan.
 - d. Proses Pengambilan Keputusan: Prosedur manajemen Pokmaswas telah ditetapkan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam penanganan pelanggaran di perikanan.
 - e. Tantangan yang dihadapi adalah SPR masih rendah dan kesulitan dalam implementasinya khususnya ukuran minimum yang boleh ditangkap.
 - f. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah konsultasi publik dengan pemangku kepentingan terkait di Teluk Hoat Sorbay dalam rangka penyusunan harvest strategy dan harvest control rule yang saat ini sedang disusun; dan kajian terkait dampak alat tangkap terhadap habitat dan ekosistem. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas, Implementasi Rencana Aksi khususnya terkait regulasi desa terkait perikanan berdasarkan hasil penilaian stok sedang dipersiapkan untuk meningkatkan pengelolaan perikanan
19. Perkembangan pengelolaan perikanan kakap dan kerapu di WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718 dengan lembaga pelaksana Asosiasi Demersal Indonesia adalah sebagai berikut:
- a. Pendugaan status stok sudah dilakukan untuk perikanan kakap merah di beberapa lokasi dan sudah dilakukan penyusunan *harvest strategy* di WPPNRI 713, 573, 711, dan 718
 - b. Fokus untuk dukungan FIP dari pembeli untuk selain dari pembiayaan mandiri.
 - c. Implementasi pendataan dengan system logbook.
 - d. Tantangan stok rebuilding outcome.pendanaan. dan kajian ETP
 - e. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah harmonisasi kegiatan dari pembeli, pelaku usaha, Perusahaan, Asosiasi dll.
20. Perkembangan pengelolaan perikanan kakap dan kerapu di Teluk Saleh dengan lembaga pelaksana KP2K2B Provinsi NTB adalah sebagai berikut:
- a. Saat ini masih terdapat 2 indikator yang merah yaitu Harvest control rules & tools (1.2.2) dan Primary species outcome (2.1.1)
 - b. Tantangan yang dihadapi diantaranya adalah Implementasi Regulasi Pergub stentang pengawasan praktik penangkapan ikan yang merusak, Pengawasan Praktik Penangkapan: Keterbatasan sumber daya dan kapasitas dapat menghambat pengawasan efektif terhadap praktik penangkapan yang merusak, Strategi Pemulihan Stok Ikan, dan Perbaikan Habitat: Meningkatkan habitat dan ekosistem membutuhkan investasi signifikan dan waktu untuk hasil yang terlihat.
 - c. Tindak Lanjut antara lain: melanjutkan penyusunan Pergub dan memperkuat forum koordinasi untuk pengawasan praktik penangkapan yang merusak, serta melakukan estimasi tren penangkapan ikan dan studi habitat di Teluk Saleh. Selain itu, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi strategi

pemulihan stok ikan untuk memastikan keberhasilan, serta penerapan langkah-langkah manajemen adaptif untuk mengembangkan Aturan Kontrol Penangkapan (HCR) dan meningkatkan habitat serta ekosistem.

21. Perkembangan pengelolaan perikanan Lemuru di Selat Bali adalah sebagai berikut:
 - a. FIP Lemuru baru memulai kegiatan dengan melakukan lebih banyak diskusi dengan stakeholder terkait dengan implementasi RPP Lemuru, dan membentuk pokja pengelolaan perikanan lemuru.
 - b. Tantangan yang dihadapi diantaranya adalah Masih banyak pemangku kepentingan yang belum memahami RPP Lemuru.
 - c. Tindak Lanjut antara lain melakukan koordinasi untuk penyusunan HS Lemuru.

Beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan didiskusikan lebih lanjut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Program perbaikan perikanan, yang dikenal sebagai FIP, bertujuan untuk mendukung sertifikasi produk perikanan yang berkelanjutan dan masih perlu komitmen dan pemahaman yang sama untuk menuju sertifikasi. Upaya ini juga berfokus pada peningkatan daya saing produk perikanan, yang memberikan manfaat sosial ekonomi.
2. Saat ini terdapat 32 FIP dengan 7 ITM yang memiliki rating antara A hingga C. Progres yang dicapai sudah baik dan berjalan dengan lancar, dengan kegiatan-kegiatan perbaikan yang dilakukan (selengkapnya pada matriks masing-masing FIP).
3. Pendaatan data perikanan menjadi tantangan tersendiri karena masih dalam proses untuk implementasi logbook. Beberapa FIP melaporkan bahwa koordinasi lanjutan terkait dengan kepatuhan nelayan masih perlu ditingkatkan mengingat pentingnya registrasi dan kelengkapan dokumen nelayan dalam proses FIP.
4. Perlu adanya mekanisme pengumpulan data perikanan dari penggiat FIP agar dapat diterima dan digunakan oleh KKP dalam proses pengambilan kebijakan.
5. Program observer menjadi salah satu tantangan utama dalam kepatuhan perikanan TCT khususnya hal ini mengacu pada ketentuan RFMO. Penggiat FIP melaporkan bahwa saat ini masih kurang jumlah observer yang dapat difasilitasi oleh KKP.
6. Dibutuhkan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) bagi spesies-spesies atau kelompok jenis ikan yang masuk dalam FIP. RPP tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam pembentukan Harvest Strategy dan Harvest Control Rules, namun perlu diperhatikan terkait cakupan wilayah/penyebaran spesies ikan. Hal ini memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah agar dapat membentuk Harvest Strategy dan Harvest Control Rules berdasarkan cakupan wilayahnya.
7. Dilaporkan bahwa jumlah perikanan TCT di Samudera Hindia yang masuk dalam FIP mulai meningkat. Hal ini mengisyaratkan prioritas pendataan dan pengambilan kebijakan seperti Harvest Strategy dan Harvest Control Rules perlu diperkuat.
8. Penggiat FIP melaporkan masih kurangnya pendataan dan strategi penanganan spesies ETP.

9. Masih kurangnya pemahaman dari penggiat FIP terkait dengan tata cara kolaborasi formal dengan pihak Pemerintah. Kolaborasi formal dibutuhkan dalam proses pengambilan kebijakan khususnya dalam hal data, pendanaan, dll.
10. Biaya implementasi perbaikan perikanan masih menjadi salah satu tantangan utama dari penggiat FIP.

Berikut adalah rekomendasi yang telah dibahas berdasarkan poin-poin yang dibahas:

1. Rekomendasi untuk Program Perbaikan Perikanan (FIP): Diperlukan penguatan dan pengembangan lebih lanjut terhadap program perbaikan perikanan (FIP) untuk mencapai hasil yang lebih optimal.
2. Dukungan untuk Pengelolaan Berkelanjutan: Penting untuk memberikan dukungan yang lebih besar dalam mempercepat pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan, guna memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan.
3. Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan: Upaya harus difokuskan pada peningkatan daya saing produk perikanan, yang akan memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
4. Monitoring Progres FIP dan ITM: Progres dari 32 FIP dan 7 ITM perlu terus dipantau, dengan target rating yang berada dalam kategori A-C. Penggiat FIP juga perlu melaporkan pada pihak Fisheryprogress ataupun pihak buyer bahwa proses analisa rating masih sulit untuk diimplementasikan pada beberapa FIP. Jika dibutuhkan dan sesuai dengan proses birokrasi, pegiat FIP dapat mengajukan surat dukungan dari KKP untuk FIP yang dijalankan kepada Fisheryprogress dan atau pihak pembeli.
5. Pendataan:
 - a. Proses pendataan perikanan seperti logbook, pendataan ETP dan bycatch, perlu terus dilanjutkan dan koordinasi antara penggiat FIP, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan yang lainnya dapat diperkuat guna mendapatkan dukungan yang konkret. Adapun masukan dari perwakilan perguruan tinggi bahwa kegiatan-kegiatan pengumpulan data perikanan dapat dikolaborasikan dengan program Perguruan Tinggi.
 - b. Pengawasan terhadap kepatuhan aturan MLS harus ditingkatkan.
6. Pengumpulan data: Dapat dibuat surat edaran ataupun sosialisasi pengumpulan data perikanan yang telah dikumpulkan oleh penggiat FIP kepada KKP agar dapat dipakai dalam proses pengambilan kebijakan.
7. Program observer: Mengingat kompleksitas dalam penerapan observer, peserta pertemuan sepakat bahwa perlu pembahasan lanjutan antara pihak penggiat FIP ataupun pelaku usaha perikanan dalam mengembangkan program observer di Indonesia termasuk mekanisme kerjasama dengan Pemerintah Indonesia.
8. Rencana Pengelolaan Perikanan:
 - a. Perlu dilakukan pengumpulan data perikanan secara rutin agar dapat digunakan dalam pembentukan RPP.
 - b. Mekanisme kerjasama dan dukungan perlu dibahas oleh masing-masing penggiat FIP dengan KKP mengingat jumlah RPP yang dibutuhkan.
 - c. Perlu dilakukan sosialisasi mekanisme kerjasama oleh Biro Perencanaan KKP agar proses kerjasama antara penggiat FIP

dengan KKP dapat dilakukan sehingga memberikan ruang dukungan-dukungan yang dapat dikerjasamakan.

9. Pengembangan HS dan HCR:
 - a. Diperlukan pengembangan yang lebih baik untuk HS dan HCR, dengan memperhatikan cakupan wilayah dan distribusi spesies. Penggiat FIP dapat memastikan terkait dengan data-data yang ada dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.
 - b. Perlu adanya pembahasan khusus terkait dengan HS dan HCR perikanan TCT di Samudera Hindia.
10. Strategi dan biaya FIP:
 - a. Menyusun Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan (RAPP) dan membentuk komite atau forum ilmiah untuk pengelolaan yang lebih efektif, serta membentuk kelompok kerja (pokja) yang fokus pada isu-isu kritis dalam pengelolaan perikanan.
 - b. Membuka ruang diskusi antar penggiat FIP agar permasalahan strategis dan peluang pembiayaan dapat dibahas.
11. Berdasarkan hasil survei setelah kegiatan, mayoritas dengan 54% peserta melihat kegiatan pertemuan koordinasi FIP nasional perlu dilakukan paling tidak satu tahun sekali. Sedangkan ada 29% memilih dua tahun sekali dan 14% tidak tahu. Peserta juga memberikan masukan agar diperbanyak waktu untuk diskusi antar peserta dengan perwakilan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan pengelolaan perikanan dapat ditingkatkan dan keberlanjutan sumber daya laut dapat terjaga.

Lampiran:

Dokumentasi Peserta Pertemuan

